Pengaruh Akuntabilitas Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung)

Oleh :
Fitriyani Sudarman
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
Jl. Dipatiukur 112
E-mail : Fitriyani.sudarman@gmail.com

Abstract

This research is done on Regional Work Unit Bandung. Problems that happens is there are still weaknesses in Intern control and accountability on an institution not good enough so that it can reduce the performance of local government instutitutions.

This research aims to analyze and assess how much influence accountability and Intern control to the performance of local government instutitutions on Regional Work Unit Bandung.

The type of this research is a quantitative research. The population in this research is 34 Regional Work Unit Bandung. Sampling method used was sampling saturated. To test this hypothesis the author uses primary data by spreading the questionnaire, which was distributed directly to the Head Regional Work Unit and Head of the Division of Finance as respondents. Data analysis techniques using (SEM) PLS with the help SmartPLS 3.0.

The research results showed that accountability and Intern control significant effect on the performance of local government instutitutions on Regional Work Unit Bandung.

Keywords: Accountability, Intern Control, Performance of Local Government Instutitutions.

I. Pendahuluan

Latar Belakang Penelitan

Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh peran dan kinerja sektor publik (Mardiasmo, 2009: 2). Kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah (Mahsun, 2013: 26). Keberhasilan organisasi sektor publik tidak dapat diukur semata-mata dari perspektif keuangan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya diluar keuangan (Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, 2014: 157).

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Dalam proses penganggaran dan evaluasinya, organisasi sektor publik, khususnya pemerintah, selalu terfokus pada pengukuran *input (means measure)*, bukan pengukuran *outcome (ends measure)*. Pengukuran demikian hanya berfokus pada penjelasan aktivitas-aktivitas organisasi, tetapi tidak menjelaskan dampak program-program pembangunan terhadap masyarakat (Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, 2014: 157).

Berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan yaitu dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2014 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), hasil pemeriksaan kinerja menemukan 6 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp77,90 miliar, 5 kasus ketidakefisienan, dan 173 kasus ketidakefektifan senilai Rp419,59 miliar (Harry Azhar Azis, 2014).

Fenomena yang terjadi dilapangan yaitu dari 6.859 laporan yang diterima Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sepanjang tahun lalu, terdapat 2.853 laporan yang mengeluhkan kinerja pemerintah daerah. Sejumlah masalah misalnya berasal dari pembangunan jalan yang mangkrak, persoalan konflik lahan, dan pejabat tak bersikap profesional serta koruptif (Laode Ida, 2016).

Wali Kota Bandung menyatakan bahwa PD Pasar Bermartabat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung yang tengah disoroti karena kinerjanya yang belum memuaskan, seperti proyek pembangunan pasar yang tak kunjung rampung. Dari semua agenda reformasi yang dilakukan, beberapa unit kerja tidak berjalan. Ada unit kerja yang tidak

berjalan hampir 2,5 tahun. Salah satu masalah yang belum diselesaikan diantaranya revitalisasi Pasar Sae Sarijadi (Ridwan Kamil, 2016).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya yang dinilai kinerjanya kurang memuaskan yaitu Dinas Perhubungan Kota Bandung. Banyak agenda reformasi yang tidak tercapai. Banyak program Dinas Perhubungan yang tidak berjalan sesuai target, diantaranya taksi yang dimonopoli, reformasi angkot yang tidak berjalan, proyek *cable car* telat, dan lain-lain (Ridwan Kamil, 2016).

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas. Pengukuran kinerja menunjukan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja (Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, 2014: 159).

Fitrawansyah (2014: 74) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pada organisasi pemerintah, pertanggungjawaban menghambat keleluasan wakil rakyat dan pegawai pemerintahan untuk menyimpang dari tanggung jawabnya. Dengan demikian penyalahgunaan dapat terkurangi (Indra Bastian, 2010: 385).

Instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Kemudian, pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapain tujuan dan sasaran instansi pemerintah (Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, 2014: 167).

Namun pada kenyataannya, hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menyatakan dari 34 provinsi, setengah lebih dari Pemerintah Provinsi yang ada akuntabilitas kinerjanya dinilai masih kurang (Yuddy Chrisnandi, 2015). Nilai LAKIP Kota Bandung pada tahun 2013 tercatat sebesar 55,14 atau kategori CC. Hal itu menunjukan fakta bahwa manajemen dan budaya kinerja Kota Bandung belum berjalan optimal (Yossi Irianto, 2015).

Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas dinas di kota/kabupaten di Jawa Barat harus dibahas dalam

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), karena dari nilai di Kementrian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akuntabilitas sejumlah kota/kabupaten di Jawa Barat masih kurang bagus. Masih banyak program yang manfaatnya kurang dirasakan masyarakat, meskipun jumlah anggaranya banyak akan kurang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh (2016) menjelaskan kelemahan intansi pemerintah dalam menerapkan akuntabilitas kinerja yang terjadi selama ini, salah satunya adalah kurang terukurnya indikator kinerja yang menjadi sasaran atau pencapaian target.

Pengendalian intern merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi, pengendalian intern juga terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja (Rahmadi Murwanto, 2012: 195).

Rina Tresnawati (2012) menyatakan bahwa pengendalian intern mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan pengendalian intern terhadap kinerja instansi sangatlah penting dilakukan, agar terhindar dari kecurangan dan penyelewengan serta dapat mempersempit ruang gerak oknum-oknum aparat pemerintah yang bekerja tidak sesuai dengan tugas pokok mereka. Pengendalian intern memegang peran penting didalam memberikan pelayanan bagi kemajuan instansi pemerintah khususnya didalam pencapaian target yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.

Tujuan pengendalian salah satunya adalah sebagai alat mencegah aktivitas yang tidak perlu dan untuk penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan efektif (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010: 239). Sehingga pengendalian intern yang baik akan mencapai kinerja instansi pemerintah yang berkonsep *value for money* (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas).

Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kota Bandung kinerjanya belum memuaskan dikeranakan hasil pemeriksaan kinerja dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2014 Pemerintah Kota Bandung mengungkapkan adanya kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Harry Azhar Azis, 2014). Permasalahan dalam pengendalian intern salah satunya, sejumlah

pencatatan transaksi tidak dapat dijelaskan dan ditelusuri seperti yang terjadi pada Dinas Pelayanan Pajak yaitu Piutang Pajak senilai Rp2,06 miliar yang tidak dapat ditelusuri dan Kepala Dinas Pelayanan Pajak belum sepenuhnya melaksanakan verifikasi dan validasi atas piutang serta Dinas Pelayanan Pajak tidak cermat dalam menatausahakan pajak daerah. Kondisi tersebut terjadi karena pencatatan dan pelaporan transaksi tersebut belum didukung oleh pengendalian intern yang memadai sehingga tidak akuratnya dan tidak lengkapnya transaksi serta tidak didukung oleh dokumen yang memadai (Emmy Mutiarini, 2015). Sedangkan yang terjadi pada Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu kurang optimalnya dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan fasilitas SOR/GOR sehingga Pemerintah Kota Bandung kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan atas retribusi pemanfaatan SOR/GOR (Emmy Mutiarini, 2015). Sementara itu, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Tata Ruang dan Cipta karya, Dinas Pemakaman dan Pertamanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta BAPPEDA terdapat aset tetap yang belum dapat ditelusuri keberadaannya. Pemerintah Kota Bandung belum melakukan inventarisasi dan penertiban pencatatan nilai aset secara memadai (Emmy Mutiarini, 2015).

Berdasarkan uraian – uraian diatas serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis mencoba untuk mengkaji ulang terkait perubahan – perubahan yang terjadi dalam akuntabilitas dan pengendalian intern serta pengaruhnya terhadap kinerja Instansi Pemerintah dengan memilih judul "**Pengaruh Akuntabilitas Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung)".**

Rumusan Masalah

1) Seberapa besar pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung.
2) Seberapa besar pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung.

Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran atas pengaruh akuntabilitas dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi

pemerintah dengan menggunakan data yang diperoleh dan uji empiris, guna memecahkan masalah.

Tujuan Penelitian

1) Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung.
2) Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung.

Kegunaan Penelitian

A. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada kinerja instansi pemerintah maupun masalah pada akuntabilitas dan pengendalian intern. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, maka fenomena pada kinerja instansi pemerintah dapat diperbaiki dengan meningkatkan akuntabilitas dan pengendalian intern.

B. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa kinerja instansi pemerintah yang optimal dipengaruhi oleh akuntabilitas dan pengendalian intern yang tinggi, serta untuk pengembangan ilmu terkait dengan pengaruh akuntabilitas dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Kajian Pustaka

Akuntabilitas

Menurut Mohamad Mahsun (2013: 83), Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah *(agent)* untuk memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah *(principal)* yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Abdul Halim dan Syam Kusufi (2012: 20), Akuntabilitas juga merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Sedangkan menurut Indra Bastian (2010: 385), Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Ellwood (1993) dalam Mohamad Mahsun (2013: 86) menjelaskan empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1) Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (*Accountability for probity and legalty*);
2) Akuntabilitas Proses (*Process accountability);*
3) Akuntabilitas Program (*program accountability);*
4) Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*);

Pengendalian Intern

Menurut Abdul Halim (2015: 207), Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut I Gusti Agung Rai (2011: 283), pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya.

Menurut Rahmadi Murwanto (2012: 195), Pengendalian intern merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi, pengendalian intern juga terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja.

Menurut Abdul Halim (2015: 214), indikator pengendalian intern yaitu:

1) Review
2) Pengolahan Informasi

3) Pengendalian Fisik
4) Pemisahan Tugas

Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Mohamad Mahsun (2013: 25), Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Sedangkan menurut Simanjutak (2011: 1) kinerja adalah pencapaian hasil pelaksanaan tugas tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengatakan bahwa Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Menurut (Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, 2014: 160), salah satu pendekatan yang diukur dalam proses pengukuran kinerja adalah konsep yang dikenal dengan *Value for Money*. Dalam konsep ini, indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Ekonomis
2) Efisiensi
3) Efektivitas

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Menurut Fitrawansyah (2014: 74), Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Mahmudi (2010: 11) menyatakan bahwa pertanggungjawaban atau akuntabilitas sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi karena untuk mencegah timbulnya *moral hazard* dalam kinerja suatu organisasi diperlukan saluran-saluran akuntabilitas yang bersistem dengan baik sehingga sistem tersebut dapat mencegah berbagai bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi".

Teori diatas didukung oleh beberapa hasil penelitian, salah satunya adalah hasil penelitian Gede Pose Raharja, et al (2015), Daniel T.H. Manurung (2012), dan Komang Sri Wirnipin, et al (2015) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara terhadap kinerja organisasi.

Demikian pula menurut penelitian Yulia Petra Harvianda, et al (2014) menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di satuan kerja perangkat daerah. Akuntabilitas publik dapat meningkatkan kinerja pemerintah, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya dapat mengetahui rencana anggaran dari program yang dijalankan pemerintah tetapi juga mengetahui bagaimana pelaksanaan program kerja yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah

Rahmadi Murwanto (2012: 195) menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi, pengendalian intern juga terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja".

Teori diatas didukung oleh beberapa hasil penelitian, salah satunya adalah hasil penelitian Nur Azlina, et al (2014) dan Miswaty (2015) menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin baik dan efektif pengendalian intern yang dilaksanakan, maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik.

Didukung pula dengan penelitian Rina Tresnawati (2012) yang menyimpulkan bahwa pengendalian intern mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pada Dinas. Pelaksanaan pengendalian intern terhadap kinerja instansi sangatlah penting dilakukan, agar terhindar dari kecurangan dan penyelewengan serta dapat mempersempit ruang gerak oknum-oknum aparat pemerintah yang bekerja tidak sesuai dengan tugas pokok mereka. Pengendalian intern

memegang peran penting didalam memberikan pelayanan bagi kemajuan dinas khususnya didalam pencapaian target yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H_2 : Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas, Pengendalian Intern dan Kinerja Instansi Pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Metode verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistik yaitu Model Persamaan Struktural *(Structural Equation Model/SEM)* berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan *Partial Least Square* (PLS). Pertimbangan menggunakan model ini, karena kemampuannya untuk mengukur konstruk melalui indikator-indikatornya serta menganalisis variabel indikator, variabel laten, dan kekeliruan pengukurannya.

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang diisi oleh responden. Responden dari penelitian ini adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung sebanyak 69 orang. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung yaitu sebanyak 34 SKPD. Teknik pengambilan ampel dalam penelitian ini menggunakan sample jenuh.. Analisis deskriptif menggunakan persentase skor aktual. Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan. Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS 3.0.* Model persamaan strukturan berbasis *variance* (PLS) mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator *(variable manifest)*

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Verifikatif

Tanggapan responden pada variabel Akuntabilitas diukur dengan empat indikator, yaitu Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (*Accountability for probity and legalty*); Akuntabilitas Proses (*Process accountability);* Akuntabilitas Program (*program accountability);* Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*). Hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa Akuntabilitas pada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung berada dalam kategori baik namun masih belum optimal dikarenakan masih terdapat *gap*. Jika dilihat dari segi indikator, indikator akuntabilitas program memiliki tanggapan responden paling kecil dan berada dalam kategori cukup baik.

Tanggapan responden pada variabel Pengendalian Intern diukur dengan empat indikator, yaitu *review*; pengolahan informasi; pengendalian fisik; dan pemisahan tugas. Hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa Pengendalian intern pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung berada dalam kategori baik namun masih belum optimal dikarenakan masih terdapat *gap*. Jika dilihat dari segi indikator, indikator *review* memiliki tanggapan responden paling kecil dan berada dalam kategori cukup baik.

Tanggapan responden pada variabel Kinerja Instansi Pemerintah diukur dengan tiga indikator, yaitu indikator ekonomis; efisiensi; dan efektivitas. Hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung berada dalam kategori cukup baik. Hal ini menunjukan bahwa Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung dinilai cukup baik dan masih terdapat masalah. Tanggapan responden untuk ketiga indikator termasuk ke dalam kriteria cukup baik.

Hasil Analisis Verifikatif

1) Hasil Pengujian Kecocokan Model Pengukuran *(Outer Model)*

Keempat indikator Akuntabilitas sudah valid dan reliabel dalam merefleksikan variabel laten Akuntabilitas. Hasil bobot faktor *(loading factor)* menunjukkan bahwa indikator Akuntabilitas Proses paling kuat dalam merefleksikan variabel laten Akuntabilitas, sebaliknya indikator Akuntabilitas Kebijakan paling lemah dalam merefleksikan variabel laten Akuntabilitas (Gambar 4.1).

Keempat indikator Pengendalian Intern sudah valid dan reliabel dalam merefleksikan variabel laten Pengendalian Intern. Hasil bobot faktor *(loading factor)* menunjukkan bahwa indikator *review* paling kuat dalam merefleksikan variabel laten Pengendalian Intern, sebaliknya indikator pengolahan informasi paling lemah dalam merefleksikan variabel laten Pengendalian Intern (Gambar 4.1).

Ketiga indikator Kinerja Instansi Pemerintah sudah valid dan reliabel dalam merefleksikan variabel laten Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil bobot faktor *(loading factor)* menunjukkan bahwa indikator efektivitas paling kuat dalam merefleksikan variabel laten Kinerja Instansi Pemerintah, sebaliknya indikator efisiensi paling lemah dalam merefleksikan variabel laten Kinerja Instansi Pemerintah (Gambar 4.1).

2) Hasil Pengujian Kecocokan Model Struktural *(Inner Model)*

Nilai koefisien korelasi Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,582 dan termasuk ke dalam kriteria korelasi sedang dan hubungan positif. Artinya Akuntabilitas yang baik akan diikuti dengan Kinerja Instansi Pemerintah yang baik pula.

Nilai koefisien determinasi (R2) Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,207 dan termasuk ke dalam kriteria determinasi sedang. Artinya kontribusi Akuntabilitas sebesar 20,7% terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, sisanya sebesar 79,3% merupakan faktor-faktor yang tidak diteliti (Gambar 4.1).

Nilai koefisien korelasi Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,592 dan termasuk ke dalam kriteria korelasi sedang dan hubungan positif. Artinya pengendalian intern yang baik akan diikuti dengan Kinerja Instansi Pemerintah yang baik pula. Nilai koefisiendeterminasi (R2) Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,225 dan termasuk ke dalam kriteria determinasi sedang. Artinya kontribusi Pengendalian Intern sebesar 22,5% terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, sisanya sebesar 77,5% merupakan faktor-faktor yang tidak diteliti (Gambar 4.1).

Untuk menguji hipotesis pertama dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho: $\beta = 0$: Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Ha: $\beta \neq 0$: Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa nilai thitung = 3,037. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yang diperoleh dengan tingkat kesalahan 5% sebesar 2,003. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} = 3,037 lebih besar dari nilai $t\text{-}_{tabel}$ = 2,003. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung.

Untuk menguji hipotesis kedua dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho: $\gamma = 0$: Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Ha: $\gamma \neq 0$: Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa nilai t_{hitung} = 4,061. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yang diperoleh dengan tingkat kesalahan 5% sebesar 2,003. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} = 4,061 lebih besar dari nilai $t\text{-}_{tabel}$ = 2,003. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung.

Pembahasan

Hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan besar pengaruh sebesar 20,7%. Artinya Akuntabilitas berpengaruh sebesar 20,7% terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, sisanya sebesar 79,3% merupakan faktor-faktor yang tidak diteliti seperti Sumber Daya Manusia, anggaran berbasis kinerja, dan transparansi.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, Artinya Akuntabilitas yang baik akan diikuti dengan Kinerja Instansi Pemerintah yang baik pula. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah, dimana menurut Fitrawansyah (2014: 74) akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Menurut Mahmudi (2010: 11)

akuntabilitas sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi karena untuk mencegah timbulnya penyimpangan dalam kinerja suatu organisasi diperlukan saluran-saluran akuntabilitas yang bersistem dengan baik sehingga sistem tersebut dapat mencegah berbagai bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi.

Teori diatas didukung oleh beberapa hasil penelitian, salah satunya adalah hasil penelitian Gede Pose Raharja, et al (2015) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja organisasi. Serta penelitian Daniel T.H. Manurung (2012) yang mengatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan besar pengaruh sebesar 22,5%. Artinya kontribusi Pengendalian Intern sebesar 22,5% terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, sisanya sebesar 77,5% merupakan faktor-faktor yang tidak diteliti yaitu pengawasan intern, anggaran berbasis kinerja, dan Sumber Daya Manusia.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, artinya pengendalian Intern yang baik akan diikuti dengan tingkat Kinerja Instansi Pemerintah yang baik pula. Hasil penelitian ini didukung oleh teori menurut Rahmadi Murwanto (2012: 195) bahwa pengendalian intern merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi, pengendalian intern juga terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja. Teori diatas didukung oleh beberapa hasil penelitian, salah satunya adalah hasil penelitian Nur Azlina, et al (2014) dan Miswaty (2015) menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin baik dan efektif pengendalian intern yang dilaksanakan, maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik.

Didukung pula dengan penelitian Rina Tresnawati (2012) yang menyimpulkan bahwa pengendalian intern mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pada Dinas. Pelaksanaan pengendalian intern terhadap kinerja instansi sangatlah penting dilakukan, agar terhindar dari kecurangan dan penyelewengan serta dapat mempersempit ruang gerak oknum-oknum aparat pemerintah yang bekerja tidak sesuai dengan tugas pokok mereka. Pengendalian intern

memegang peran penting didalam memberikan pelayanan bagi kemajuan dinas khususnya didalam pencapaian target yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan fenomena pada latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, dan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh akuntabilitas dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1) Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung, artinya semakin baik akuntabilitas, maka hal tersebut akan meningkatkan kinerja instansi pemerintahnya. Masalah pada akuntabilitas terjadi karena:
   a) Sebagian besar pegawai belum menghindari masalah dalam melaksanakan tugas.
   b) Prosedur yang dilaksanakan oleh instansi dalam melaksanakan tugas masih belum optimal.
   c) Pelaksanaan kegiatan/program instansi selama ini belum berjalan sesuai dengan target.
   d) Selama ini instansi dalam pelaksanaan kegiatan kurang mengacu pada pemerintah pusat/daerah.
2) Pengendalian intern berpengaruh sedang/cukup terhadap kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung, artinya semakin diterapkannya pengendalian intern maka hal tersebut akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena memiliki beberapa masalah seperti:
   a) Pimpinan belum optimal dalam me-*review* kinerja para staf.
   b) Pencatatan transaksi tidak dapat ditelusuri dan dijelaskan serta dalam pengecekan otorisasi, akurasi, dan kelengkapan transaksi masih belom optimal.
   c) Pengamanan aktiva secara fisik didalam instansi belum cukup baik atau aman.
   d) Pelaksanaan otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, dan pengawasan terhadap aktiva selama ini masih jarang terpisah.

Saran

Peneliti telah memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh akuntabilitas dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung), maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

Saran Operasional

1) Untuk meningkatkan akuntabilitas yang masih belum optimal Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung, makan peneliti memberikan saran operasional sebagai berikut:
   a) Meningkatkan sikap jujur dan bertanggung jawab pada setiap pegawai dalam melaksanakan tugas dengan menghindari penyalahgunaan jabatan dengan cara mengirim pegawai untuk mengikuti Diklat Fungsional dengan tujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional. Selain itu, perlu diadakannya sistem *reward* dan *punishment* untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan berdedikasi tinggi, sehingga perlu didukung oleh sistem insentif berupa penghargaan dan sanksi sepadan.
   b) Melaksanaan aktivitas pekerjaan instansi harus dilaksankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan agar setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
   c) Melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik dan selaras dengan rencana kerja serta dapat mencapai target.
   d) Kegiatan yang kurang mengacu pada kebijakan pemerintah pusat/daerah, harus diselaraskan kembali, karena setiap kegiatan harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat/daerah.
2) Untuk meningkatkan pengendalian intern yang masih belum optimal Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung, makan peneliti memberikan saran operasional sebagai berikut:
   a) Pimpinan harus lebih sering me-*review* kinerja para staff agar setiap pekerjaan dapat terkendali dan berjalan dengan baik. Misalnya dengan cara mengadakan perubahan strategi dan rencana organisasi atau melancarkan tindakan korektif lainnya.

b) Setiap transaksi harus diotorisasi oleh personel manajemen yang berwenang, agar pengendalian yang diharapkan bagi perusahaan memuaskan dan personel manajemen yang berwenang harus selalu mengecek otorisasi, akurasi, dan kelengkapan setiap transaksi agar semua transaksi dapat ditelusuri dan jelas transaksinya.
c) Setiap instansi harus melaksanakan pengecekan dan penertiban semua aset tetap yang dimiliki instansi agar semua aset dapat ditelusuri keberadaannya.
d) Setiap tugas harus dipisahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyimpangan tugas oleh orang-orang terkait. Pimpinan dapat melakukan pemisahan tugas dengan memberikan tanggung jawab untuk mengotorisasi transaksi, mencatat transaksi, dan melakukan pengawasan terhadap aktiva kepada orang-orang yang berbeda.

Saran Akademis

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama, dengan menambahkan indikator yang tidak digunakan dalam penelitian ini agar diperoleh kontribusi pengaruh yang lebih kuat antara pengaruh akuntabilitas dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang sama yaitu SEM PLS, tetapi dengan unit analisis, populasi, dan sampel yang digunakan berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hafiz Tanjung. 2014. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual.* Bandung : Afabeta.

Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi.* Salemba Empat : Jakarta.

Abdul Halim. 2015. *Auditing 1.* Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Daniel T.H. Manurung. 2012. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas Dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangkaraya*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika JINAH Vol. 2 No.1 Singaraja, Desember 2012 ISSN 2089-3310.

Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti. 2014. *Akuntansi Sektor Publik* Jakarta: Salemba Empat.

Deddy Mizwar. 2016. *Akuntabilitas Dinas Kurang, Musrenbang Harus Dilakukan*. Fokus Jabar. Melalui http://fokusjabar.com/ 2016/04/13/akuntabilitas-dinas-kurang-musrenbang-harus-dilakukan/. Diaskes pada tanggal 15 April 2016.

Emmy Mutiarini. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan Bpk Ri Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2014.* Bandung: Badan Pemeriksa Keuangan.

Fitrawansyah. 2014. *Fraud & Auditing.* Jakarta : Mitra Wacana Media.

Gede Pose Raharja, et al. 2015. *Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Organisasi (Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng).* e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No.1 Tahun 2015).

Harry Azhar Azis. 2014. *Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014*. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Melalui : http://www.bpk.go.id/news/hasil-pemeriksaan-bpk-semester-i-tahun-2014. diakses pada tanggal 15 September 2015.

I gusti Agung Rai. 2011. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Jakarta : Grafindo.

Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Irham Fahmi. 2013. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi.* Bandung : Alfabeta.

Komang Sri Wirnipin, et al. 2015. *Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Dan Akuntablitas Publik Terhadap Kinerja Organisasi Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No.1 Tahun 2015).

Laode Ida. 2016. *Potensi Korupsi: Masyarakat Adukan 2.853 Laporan Soal Layanan Pemda.* Bisnis.com Melalui http://kabar24.bisnis.com /read/20160401/15/533460/potensi-korupsi-masyarakat-adukan-2.853 laporan-soal-layanan-pemda. Diakses pada tanggal 2 April 2016.

M. Yusuf Ateh. 2016. *Boyong Pemkab dan Pemkot Serahkan Laporan Kinerja, Pemprov Riau Diapresiasi.* Indopos Melalui http://www.indopos.co.id/ 2016/03/boyong-pemkab-dan-pemkot-serahkan-laporan-kinerja-pemprov-riau-diapresiasi.html. Diakses pada tanggal 27 Maret 2016.

Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publk.* Yogyakarta: ANDI.

Miswaty dan Tutik Yuliani. 2015. *Analisis Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Pengendalian Intern Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Pada Pemerintah Kota Balikpapan*. ISSN 2460-0784.

Mohamad Mahsun. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.

Nur Azlina & Desmiyawati. 2012. *Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Organisasi*. Pekbis Jurnal, Vol. 4, N0. 2, Juli 2012.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rahmadi Murwanto. 2012. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. LPKPAP.

Ridwan Kamil. 2016. *Kinerja Buruk, Ridwan Kamil Berhentikan Sementara Dirut PD Pasar.* Republika. Melalui http://nasional.republika.co.id/ berita/nasional/daerah/16/02/05/o225k7335-kinerja-buruk-ridwan-kamil-berhentikan-sementara-dirut-pd-pasar. Diakses pada tanggal 8 Februari 2016.

Ridwan Kamil. 2016. *Kinerjanya Buruk, Ricky Gustiady 'Dipecat' Emil*. Fokus Jabar. Melalui http://fokusjabar.com/2016/01/12/kinerjanya-buruk-ricky-gustiady-dipecat -emil/. Diakses pada tanggal 15 Januari 2016.

Rina Tresnawati. 2012. *Pengaruh Efektifitas Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.* ISBN : 978-602-17225-0-3.

Simanjutak, Payaman J. 2011. *Manajemen & Evaluasi Kinerja*. Jakarta : LPFEUI.

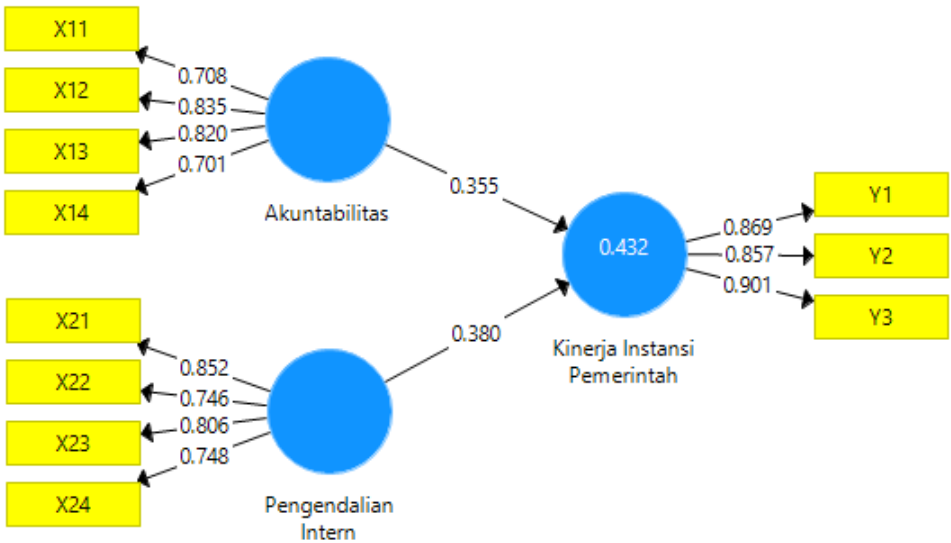
Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Auditing: Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yossi Irianto. 2015. *Strategi Pembangunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung*. Melalui : http://orpad.bandung.go.id/document/11_Sekda% 20Kota%20Bandung. Yogyakarta: Rapat Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2016.

Yuddy Chrisnandi. 2015. *Akuntabilitas Kinerja Rendah, Pengaruhi DAK Provinsi.* Berita Satu. Melalui http://www.beritasatu.com/nasional/331936-akuntabilitas-kinerja-rendah-pengaruhi-dak-provinsi.html. diakses pada tanggal 15 September 2015.

Yulia Petra Harvianda, R. Adri Satriawan Surya, dan Nur Azlina. 2014. *Pengaruh Pengawasan Fungsional Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau).* JOM FEKON Vol.1 no. 2 Oktober 2014.

LAMPIRAN



Gambar 4.1
Hasil perhitungan Variabel Penelitian secara Keseluruhan